

WORLD POLITICS

KKB

KK-25

327.1

1009

r

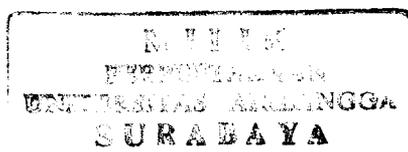


LAPORAN PENELITIAN
DIK SUPLEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2002

RESPON PUBLIK DAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENYIKAPI SERANGAN AMERIKA SERIKAT KE AFGANISTAN

Peneliti:

M. MUTTAQIEN, SIP.
SITI ROKHMAWATI SUSANTO, SIP
JOKO SUSANTO, SIP.



3000243033141

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh Dana DIK Suplemen Universitas Airlangga Tahun 2002

S.K Rektor Universitas Airlangga Nomor 4879/J03/PG/2001

Tanggal 7 Juni 2002

Nomor Urut: 41

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nopember, 2002



LEMBAGA PENELITIAN

- | | | |
|--|---------------------------------------|--|
| 1. Puslit Pembangunan Regional | 5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720) | 9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719) |
| 2. Puslit Obat Tradisional | 6. Puslit Studi Wanita (5995722) | 10. Puslit Kesehatan Reproduksi |
| 3. Puslit Pengembangan Hukum (5923584) | 7. Puslit Olah Raga | |
| 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718) | 8. Puslit Bioenergi | |

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066
E-mail : lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. Judul Penelitian : Respon Publik dan Pemerintah Indonesia dalam Menyikapi Serangan Amerika Serikat ke Afghanistan
- a. Macam Penelitian : Fundamental Terapan Pengembangan
- b. Kategori Penelitian : I II III
2. Kepala Poyek Penelitian
- a. Nama lengkap dan Gelar : M. Muttaqien, S.I.P.
- b. Jenis kelamin : Laki-laki
- c. Pangkat/Golongan dan NIP : Penata Muda/III A/132 230 968
- d. Jabatan Sekarang : Asisten Ahli
- e. Fakultas/Puslit/Jurusan : ISIP/Ilmu Hubungan Internasional
- f. Univ/Ins./Akademi : Universitas Airlangga
- g. Bidang Ilmu yang diteliti : Ilmu Hubungan Internasional
3. Jumlah Tim Peneliti : 3 (tiga) orang
4. Lokasi Penelitian : Yogyakarta, Surabaya
5. Kerjasama dengan Instansi lain
- a. Nama Instansi : -
- b. Alamat : -
6. Jangka waktu penelitian : 5 (lima) bulan
7. Biaya yang diperlukan : Rp. 4.000.000,00
8. Seminar Hasil Penelitian
- a. Dilaksanakan Tanggal :
- b. Hasil Penelitian : () Baik Sekali () Baik
() Sedang () Kurang

Surabaya.



Mengetahui/Mengesahkan
a.n. Rektor
Ketua Lembaga Penelitian.

Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.
NIP 130 701125

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
I. PENDAHULUAN	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	17
IV. METODE PENELITIAN	18
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	20
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	44
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	48

RINGKASAN

RESPON PUBLIK DAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENYIKAPI SERANGAN AMERIKA SERIKAT KE AFGHANISTAN

(M. Muttaqien, Siti Rokhmawati Susanto, Joko Susanto, 2002, 48 halaman)

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan (1) Bagaimana respon publik dan pemerintah Indonesia dalam menyikapi serangan Amerika Serikat ke Afghanistan, (2) Bagaimana keterkaitan antara respon publik dan sikap pemerintah dalam menyikapi serangan Amerika Serikat ke Afghanistan ?

Tujuan penelitian ini adalah (1) melakukan identifikasi sikap publik dan pemerintah Indonesia dalam merespon serangan Amerika Serikat ke Afghanistan dan (2) memahami hubungan atau korelasi antara sikap publik dan pemerintah Indonesia terutama dalam perumusan politik luar negeri.

Penelitian ini dilakukan melalui kombinasi antara riset kepustakaan (*library research*) dan pengamatan tidak langsung di lapangan melalui telaah naskah baik dari pernyataan resmi pemerintah, ormas, partai politik, pressure group, tokoh-tokoh masyarakat, dan tajuk media massa (dalam hal ini dipilih tiga media massa nasional *Kompas*, *Jawa Pos*, dan *Republika*), berkaitan dengan serangan Amerika Serikat ke Afghanistan. Data-data kemudian diklasifikasikan mana yang termasuk kategori respon publik dan mana yang termasuk kategori respon pemerintah. Selanjutnya, dari data-data yang ada dianalisis pola hubungan atau keterkaitan antara respon publik dan pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum respon publik terhadap serangan Amerika Serikat ke Afghanistan adalah menolak serangan tersebut dengan diiringi aksi demonstrasi, pengiriman sukarelawan ke Afghanistan, ancaman sweeping, ancaman boikot produk AS, dan penggalangan dana kemanusiaan. Sementara itu, respon pemerintah mengalami pergeseran dari sikap yang tidak secara spesifik menolak rencana serangan Amerika Serikat ke

Afghanistan, kemudian sikap keprihatinan yang mendalam setelah Amerika Serikat benar-benar menyerang Afghanistan, dan terakhir tidak membenarkan serangan Amerika Serikat (statemen Presiden Megawati pada peringatan Isra' Mi'raj). Penelitian ini juga menemukan keterkaitan antara respon publik dan pemerintah dalam menyikapi serangan Amerika Serikat ke Afghanistan. Keterkaitan itu dapat dilihat dari pergeseran sikap pemerintah dalam kebijakan luar negerinya yang tidak lepas dari desakan-desakan publik. Selain itu, keterkaitan juga dapat dilihat dari kebijakan domestik pemerintah dalam merespon aksi-aksi yang dilakukan publik Indonesia. Dalam penelitian ini juga ditemukan data adanya pengaruh luar negeri (terutama Amerika Serikat) dalam kebijakan domestik pemerintah, terutama dalam menyikapi terkait aksi-aksi anti AS di tanah air.

Berdasar hasil penelitian ini disarankan untuk menggali lebih dalam bagaimana pengaruh luar negeri, terutama Amerika Serikat, dalam kebijakan pemerintah merespon serangan Amerika Serikat ke Afghanistan.

(Lab. Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, DIK Suplemen Unair tahun 2002, SK Rektor Unair No. 4879/103/PG/2002 tanggal 7 Juni 2002)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, ditengah kami menjalankan ibadah puasa penelitian ini dapat diselesaikan. Penelitian ini berusaha memahami dinamika hubungan antara publik dan pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan, terutama kebijakan luar negeri.

Perubahan sosial dan politik di Indonesia sejak reformasi 1998, memberikan ruang kepada publik untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan. Isu-isu internasional yang pada umumnya elitis pada studi kasus serangan AS ke Afghanistan, justru bersifat populis, sehingga menimbulkan respon dari sebagian kalangan di Indonesia. Respon itu baik berasal dari publik yang direpresentasikan oleh partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media massa, dan tokoh masyarakat, maupun dari pemerintah. Tampaknya, seiring perubahan kehidupan kenegaraan kearah yang lebih demokratis, suara-suara publik mulai mendapat tempat dalam proses pengambilan kebijakan. Setidaknya itulah data yang kami dapatkan dalam penelitian ini.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselesaikannya tulisan ini. Terakhir, masukan, kritik, dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan laporan penelitian ini.

Surabaya, 22 November 2002

Tim Peneliti

BAB I

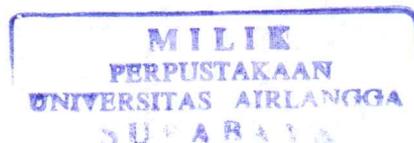
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Serangan 11 September 2001 yang diikuti dengan kampanye Amerika Serikat melawan terorisme mengubah peta politik internasional. Perubahan peta itu secara sepihak dilakukan oleh Amerika Serikat dengan mengklasifikasikan negara-negara di dunia menjadi dua yaitu pro teroris dan anti teroris. Tidak ada kesempatan bagi negara manapun dalam kampanye global Amerika melawan terorisme mengambil posisi netral. Netralitas dipandang sebagai sikap pro teroris.

Selang sekitar satu bulan pasca peristiwa 11 September, tepatnya tanggal 7 Oktober 2001 Amerika Serikat melakukan serangan ke Afghanistan yang ketika itu di bawah rezim Taliban. Sebuah rezim yang dituduh oleh Amerika Serikat melindungi jaringan Al-Qaeda pimpinan Usamah bin Laden musuh nomor satu Amerika Serikat. Serangan Amerika Serikat ini menimbulkan kecaman dari berbagai negara terutama dari negara-negara Islam mengingat belum adanya cukup bukti keterlibatan Usamah dalam peristiwa 11 September dan jatuhnya korban-korban sipil di pihak rakyat Afghanistan.

Publik Indonesia, terutama kalangan Islam, merespon peristiwa serangan Amerika tersebut dengan melakukan serangkaian aksi demonstrasi terutama di Kedutaan Besar dan Konsul Jenderal AS yang ada di Medan dan Sutrabaya. Di beberapa kota seperti Solo dan Surabaya muncul isu *sweeping* terhadap warga negara Amerika Serikat. Sikap anti AS juga diwujudkan dalam bentuk boikot terhadap



produk-produk AS. Di Yogyakarta terjadi penyegelan terhadap sebuah rumah makan siap saji yang berkantor pusat di Amerika Serikat, bahkan di Makassar terjadi perusakan terhadap rumah makan sejenis. Para demonstran menuntut Amerika menghentikan serangannya ke Afghanistan dan menghendaki pemerintah bersikap tegas terhadap AS.

Terkait dengan dinamika eksternal dan perkembangan internal, sejak peristiwa 11 September 2001 pemerintah telah melakukan langkah-langkah diplomatik mensikapi perkembangan di atas. Diantaranya pernyataan resmi pemerintah beberapa jam setelah serangan 11 September dengan mengutuk serangan tersebut dan menyampaikan rasa bela sungkawa atas jatuhnya korban pada peristiwa tersebut. Langkah diplomatik selanjutnya adalah kunjungan Presiden Megawati ke Amerika Serikat tanggal 18 - 25 September 2001. Sebuah kunjungan yang memiliki arti penting bagi Amerika mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Hal yang menarik dari serangkaian sikap pemerintah Indonesia menanggapi perkembangan pasca serangan 11 September adalah ketika Amerika Serikat melakukan serangan ke Afghanistan.

Pada saat Presiden Megawati berkunjung ke AS pada tanggal 19 September 2001, beliau menyatakan kecamannya terhadap terorisme, namun ketika Amerika Serikat melakukan serangannya ke Afghanistan, pemerintah mengeluarkan pernyataan keprihatinan yang mendalam atas tindakan militer yang ditempuh oleh Amerika Serikat. Sikap ini dinilai terlalu lunak oleh beberapa kalangan sehingga pada saat peringatan Isra' dan Mi'raj di Masjid Istiqlal, Presiden Megawati menyatakan bahwa tidak bisa atau tidak boleh sekelompok orang bahkan pemerintah sekalipun,

dengan dalih menangkap dan mencari pelaku kekerasan lintas, begitu saja menyerang suatu bangsa atau negara lain. Statemen ini memang tidak menyebut suatu negara, tetapi makna yang tersirat didalamnya negara yang dimaksud adalah Amerika Serikat.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana respon publik dan pemerintah Indonesia dalam menyikapi serangan Amerika Serikat ke Afghanistan
2. Bagaimana keterkaitan antara respon publik dan sikap pemerintah dalam menyikapi serangan Amerika Serikat ke Afghanistan?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori Keterkaitan Opini Publik dan Politik Luar Negeri

Guna mengetahui keterkaitan antara publik dan pemerintah, harus dipahami lebih dahulu ciri sebuah pemerintah yang demokratis. Diantara ciri sebuah pemerintah yang demokratis adalah kemampuan pemerintah mengambil keputusan yang mencerminkan kepentingan dan aspirasi rakyat. Salah satu cara untuk mengetahui aspirasi rakyat adalah dengan mengamati opini yang berkembang ditengah-tengah masyarakat mengenai isu-isu tertentu (Imawan, 1997: 46). Semakin demokratis sebuah negara, semakin responsif pemerintah dalam menyikapi aspirasi rakyatnya.

Kepentingan atau aspirasi warga negara terhadap suatu permasalahan tidak hanya menyangkut isu-isu yang bersifat lokal, tetapi juga isu-isu internasional. Aspirasi masyarakat terhadap isu-isu internasional akan ditindaklanjuti melalui kebijakan luar negeri. Dalam hal ini kajian mengenai bagaimana pengaruh opini publik terhadap isu internasional tertentu dengan kebijakan luar negeri menjadi penting. Memang tidak mudah mempelajari pengaruh opini publik terhadap perumusan politik luar negeri mengingat adanya kenyataan sebagai berikut:

Pertama, umumnya masyarakat tidak terlalu tertarik dengan masalah-masalah luar negeri. Sebagian besar masyarakat lebih tertarik dengan urusan yang paling dekat dengan kepentingan dan pekerjaannya sehari-hari, kecuali kalau ada masalah-masalah besar yang menyangkut perang dan damai yang membanjiri media

massa, informasi politik yang dianggap paling relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari adalah berita tentang masalah local dan domestik. Media massa local umumnya memberikan sedikit ruang untuk meliput perkembangan internasional, namun sedikit sekali warga mencurahkan perhatian besar terhadap masalah-masalah internasional, kecuali hal-hal yang menjadi perhatian publik dunia dan dimuat berulang-ulang oleh media massa.

Kedua, warga negara umumnya menyederhanakan masalah internasional. Pemikiran mereka seringkali hanya bertumpu pada *stereotype* baik tentang bangsa dan negara asing atau bangsa sendiri. Kompleksitas dan kerumitan masalah politik internasional yang umumnya membingungkan umumnya berada diluar jangkauan warga negara biasa. Penafsiran warganegara terhadap aktor internasional, negara dan negarawan asing cenderung berujud *stereotype* atau gambar yang sederhana dan sarat nilai. Tindakan internasional seringkali dilihat dalam kerangka nilai yang dikotomik misalnya: kawan atau lawan, agresif atau pasif, kita atau mereka, menyenangkan atau menjengkelkan dan sebagainya. Juga, citra masyarakat umum tentang politik dunia umumnya tidak canggih dan sering memihak dan tidak akurat.

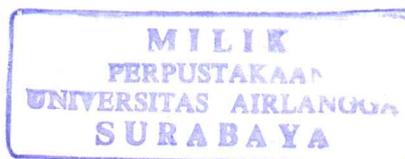
Ketiga, pendapat umum sangat tidak stabil. Ketidakstabilan pendapat umum tentang urusan internasional ini punya dua segi yaitu perubahan intensitas dan perubahan arah. Ada masa dimana masyarakat tidak peduli terhadap masalah internasional, dan ada masa dimana masyarakat memiliki perhatian yang besar terhadap masalah-masalah internasional. Kejadian internasional yang rutin dan masalah yang terjadi di negara lain umumnya kurang menarik perhatian publik suatu negara. Akan tetapi apabila kejadian internasional itu menjadi ancaman bagi

negaranya atau berkait dengan negaranya sendiri maka akan menjadi perhatian warga negara.

Dilain pihak, pendapat umum juga cenderung sering berubah-ubah arah dalam bereaksi terhadap isu dan kejadian. Di kebanyakan negara pendapat umum biasanya bersifat angin-anginan (*moody*). Berhubung dengan kurangnya informasi publik, tanggapan massa terhadap isu internasional cenderung berujud reaksi emosional, bukan pendapat yang bernalar. Reaksi seperti ini bisa berubah-ubah tergantung sifat kejadian, lama kejadian, rangsangan atau respon pemerintah, dan terkadang juga propaganda asing (Mas'ood, 1989: 71-72).

Suasana kehidupan komunikasi politik menurut Prof. Dr. Sri Sumantri yang diangkat dari pemikiran Gabriel A. Almond dan Coleman terbagi menjadi dua yaitu suasana kehidupan politik pemerintah (*the government political sphere*) atau lebih dikenal dengan istilah suprastruktur dan suasana kehidupan politik yang ada pada masyarakat (*the socio political sphere*) atau disebut dengan infrastruktur. Kedua suasana ini sebagai elemen atau unsur yang saling mempengaruhi. Suprastruktur politik menjalankan komunikasi politik melalui jalur resmi, sedangkan suasana infrastruktur politik secara generik direpresentasikan dalam beberapa kelompok yaitu: partai politik, *interest group*, *pressure group*, media massa, dan tokoh politik (Soeriawidjaja, 1997: 12-13).

Berkaitan dengan pola hubungan antara warga negara dengan kebijakan luar negeri, Chadwick Alger membagi dua komunitas politik yaitu publik dan pemerintah. Publik terdiri dari warga negara biasa, publik peminat politik luar negeri, dan elit kepentingan yang terdiri dari kelompok bisnis, buruh, petani, agama, etnik,



wanita dan veteran. Sedangkan elit pemerintah terdiri dari elit administrasi dan elit politik. Yang menjembatani hubungan publik dan pemerintah adalah media massa (Mas'ood, 1989: 76). Pola hubungan antara keduanya memungkinkan suatu kebijakan luar negeri muncul karena desakan atau tuntutan massa. Ini bukan berarti variable eksternal tidak begitu penting dalam perumusan politik luar negeri.

Suatu pemerintahan harus mampu membuat kebijakan yang dapat diterima oleh partnernya di luar negeri maupun publik domestik. Seorang pemimpin berada diantara negosiasi internasional baik dalam situasi krisis maupun normal dan tekanan dari politik domestik (Dougherty, 1997)

B. Tinjauan Pustaka Respon Publik dan Politik Luar Negeri RI

Kajian mengenai keterkaitan antara sikap publik dengan perumusan politik luar negeri Indonesia sangat jarang dilakukan. Biasanya kajian tentang permasalahan ini lebih merupakan bagian dari sebuah tema besar. Barangkali Weinstsein (1976) dalam *Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence*, yang mengulas keterkaitan antara respon publik dengan kebijakan luar negeri RI. Misalnya dalam memahami berbagai kebijakan luar negeri RI, seperti respon terhadap perang dingin, keterlibatan RI dalam konferensi Asia-Afrika, perang Vietnam, bantuan asing, peran Indonesia di Asia Tenggara, dan isu-isu lainnya Weinstein mendasarkan analisisnya pada *polling* baik terhadap publik maupun pemerintah.

Sementara itu, bagaimana publik merespon kebijakan luar negeri RI secara umum dapat dilihat dalam beberapa peristiwa. Misalnya ketika pemerintah menarik para investor dan mencari bantuan asing, terutama dari Jepang, untuk recovery

ekonomi pada masa awal pemerintahan orde baru, muncul protes dari sebagian rakyat Indonesia, terutama dari kalangan mahasiswa. Banyaknya bantuan dari Jepang memunculkan kekhawatiran akan bahaya neo-kolonialisme Jepang di Indonesia. Protes para mahasiswa ini berujung dengan pecahnya peristiwa Malari. Sekalipun ada protes dari sebagian rakyat, pemerintah tetap melanjutkan kebijakannya menarik investasi dan menggantungkan diri pada bantuan Jepang.

Hal yang sama juga terjadi ketika pemerintah merencanakan pemulihan hubungan diplomatik dengan RRC, muncul protes yang dilakukan oleh ormas-ormas dan tokoh-tokoh Islam, serta kewaspadaan di sebagian kalangan militer terutama angkatan darat. Mereka masih trauma dengan pengkhianatan PKI pada tahun 1948 dan 1965 yang tidak lepas dari peran RRC. Pertimbangan-pertimbangan pragmatis, terutama ekonomi mendorong pemerintah tetap menormalisasikan hubungan diplomatiknya dengan RRC (Rizal Sukma dalam Bantarto, 1994: 72)

Sekalipun Islam bukan menjadi pertimbangan utama dalam perumusan politik luar negeri RI (Suryadinata, 1998: 201), namun respon umat Islam dalam beberapa isu internasional layak dicermati. Adakah pengaruh signifikan respon umat Islam terhadap perumusan politik luar negeri. Misalnya pada waktu Mesir di bawah Gamal Abdul Nasher, ia menjatuhkan hukuman mati bagi beberapa tokoh Ikhwanul Muslimin seperti Sayyid Qutb dan Abdul Qodir Audah karena dituduh melakukan makar terhadap pemerintah Mesir. Pemerintah Indonesia dalam hal ini meminta kepada pemerintah Mesir untuk menanggihkan hukuman tersebut, mengingat jasa gerakan Ikhwan dalam mendukung kemerdekaan Indonesia (Zein, 1984: 74) Tuntutan

ini muncul karena desakan sebagian kalangan muslim, terutama dari Masyumi kepada pemerintah RI.

Hal yang sama juga terjadi pada masa orde baru. Beberapa isu internasional seperti invasi Irak ke Kuwait, konflik di Semenanjung Balkan, dan konflik Arab-Israel, memicu respon publik yang harus disikapi oleh pemerintah. Dalam menyikapi invasi Irak ke Kuwait terdapat beberapa kelompok di Indonesia yang menghendaki pemerintah mengambil posisi di pihak Irak. Akan tetapi Jakarta menolak untuk menuruti sikap tersebut. Posisi Indonesia pada waktu itu tidak membenarkan invasi Irak ke Kuwait, dan menyesalkan secara mendalam atas pecahnya konflik tersebut.

Kemudian, contoh berikutnya adalah konflik di Semenanjung Balkan. Konflik ini menimbulkan gelombang demonstrasi di Indonesia mengancam aksi *genocide* yang dilancarkan oleh Serbia terhadap muslim Bosnia. Para demonstran menuntut pemerintah untuk mengirim pasukan ke Bosnia. Bahkan para demonstran rela menjadi sukarelawan yang akan berjihad di Bosnia. Ketika Alija Izetbegovic, Presiden Bosnia-Herzegovina berkunjung ke Indonesia, Presiden Soeharto tidak merestui pengiriman pasukan Indonesia ke Bosnia untuk tujuan-tujuan menjaga perdamaian. Namun seiring dengan desakan publik domestik dan adanya permintaan PBB kepada Indonesia untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian, Jakarta akhirnya memutuskan mengirim 25 tentara ke Bosnia bulan Februari 1994 dan tambahan pasukan sebanyak 200 lebih pasukan bergabung dengan pasukan PBB yang ada di sana (Suryadinata, 1998: 215).

Selanjutnya, terkait dengan isu konflik Arab-Israel ada satu dinamika yang menarik mengingat konflik ini berlangsung lama dan melibatkan banyak aktor

internasional. Sikap Indonesia dalam hal ini, sejak Soekarno, Soeharto dan presiden-presiden sesudahnya, adalah tetap yaitu Indonesia tetap mendukung Palestina sampai negara tersebut mendapatkan kembali tanah yang direbut Israel dan Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sampai Israel mengembalikan tanah yang diduduki kepada bangsa Arab. Hanya saja, ada satu dinamika menarik dalam hubungan Indonesia-Israel dikaitkan dengan respon publik.

Ketika Yitzak Rabin berkunjung mendadak ke Jakarta menemui Presiden Soeharto pada bulan Oktober 1994 tanpa sepengetahuan Departemen Luar Negeri dan media massa, publik dan tokoh-tokoh muslim mengecam kunjungan tersebut karena tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel (Suryadinata, 1998: 206). Apa yang dilakukan Soeharto tersebut dapat dikatakan mengabaikan sensitifitas umat Islam. Demikian pula pada masa pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, seorang tokoh umat Islam, ketika melontarkan ide hubungan dagang dengan Israel menimbulkan kecaman komunitas muslim yang lain. Respon sebagian kalangan muslim sedemikian keras sehingga rencana pembukaan hubungan dagang dengan Israel ditanggihkan.

Melihat beberapa fakta diatas, bagaimana respon publik berpengaruh terhadap perumusan politik luar negeri, terlihat bahwa ada suatu dinamika keterkaitan antara perumusan politik luar negeri dengan dengan respon publik. Ada kalanya respon public berpengaruh terhadap perumusan politik luar negeri dan ada kalanya kebijakan luar negeri mengabaikan tuntutan-tuntutan publik.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

TUJUAN PENELITIAN:

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk;

- Pertama, melakukan identifikasi sikap publik dan pemerintah Indonesia dalam merespon serangan Amerika Serikat ke Afghanistan.
- Kedua, memahami hubungan atau korelasi antara sikap publik dan pemerintah Indonesia terutama dalam perumusan politik luar negerinya.

MANFAAT PENELITIAN:

Adapun manfaat atau kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah,

- Pertama, tersedianya sebagian bahan untuk memetakan sikap publik dalam merespon isu-isu internasional.
- Kedua, tersedianya informasi dinamika perumusan politik luar negeri RI dalam merespon tuntutan publik.
- Ketiga, tambahan pengetahuan dan pemahaman pola hubungan publik dan pemerintah dalam perumusan politik luar negeri.
- Keempat, tersedianya tambahan referensi bagi para peminat studi mengenai politik luar negeri Republik Indonesia.
- Kelima, peningkatan pemahaman tentang masalah serta peningkatan ketrampilan meneliti bagi peneliti yang terlibat.

BAB IV

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui kombinasi antara riset kepustakaan (*library research*) pengamatan tidak langsung di lapangan melalui telaah naskah baik melalui pernyataan resmi pemerintah dan organisasi massa baik sosial maupun politik, serta statemen tokoh-tokoh partai dan masyarakat yang di muat di media massa mengenai serangan Amerika Serikat ke Afghanistan. Selain itu juga telaah kejadian-kejadian yang dimuat atau diberitakan media massa berkait dengan kejadian diatas. Riset kepustakaan akan difokuskan pada pola hubungan publik dan massa dalam sejarah politik luar negeri RI. Hasil studi kepustakaan akan digunakan sebagai kerangka berpikir tentang pola hubungan publik dan pemerintah dalam perumusan politik luar negeri.

Data-data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan mana yang termasuk respon publik dan mana yang termasuk respon pemerintah. Selanjutnya, dari data-data yang ada ditarik suatu pola hubungan antara respon publik dan pemerintah, sehingga bisa ditemukan adakah keterkaitan antara respon publik dan sikap pemerintah.

Kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti secara kualitatif ditarik berdasarkan kecenderungan-kecenderungan yang terjadi. Langkah-langkah metodologis dimaksud tergambar dalam tabel berikut:

Tahap	Kegiatan	Sasaran	Hasil
I	Riset Pustaka	Telaah hubungan antara publik dan pemerintah dalam PLN RI	Generalisasi Teoritik
II	Pengamatan Lapangan Tidak Langsung	Berita-Berita Media Massa	Temuan-temuan awal respon publik dan pemerintah terkait dengan serangan AS ke Afghanistan
III	Klasifikasi temuan-temuan Tahap II	Pernyataan resmi pemerintah, ormas, parpol, kelompok penekan, tokoh masyarakat, dan tajuk rencana beberapa media.	Identifikasi respon-respon publik dan pemerintah
IV	Menyimpulkan Temuan/Analisis Akhir	Hasil Tahap III	Temuan akhir pola hubungan dan keterkaitan antara respon publik dan pemerintah.



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Respon Publik

Serangan Amerika Serikat ke Afghanistan tanggal 7 Oktober 2001, memunculkan kecaman dari berbagai dunia. Terlebih ketika serangan itu mengenai sasaran-sasaran sipil. Televisi Al-Jazeera yang bermarkas di Qatar dan memiliki akses langsung ke pemerintahan Taliban dan jaringan Al-Qaeda ikut berperan dalam membangkitkan sentiment-sentimen publik muslim untuk mengecam Amerika Serikat melalui liputan-liputan dampak serangan bagi penduduk sipil Afghanistan.

Menanggapi serangan AS ke Afghanistan yang dimulai tanggal 7 Oktober 2002 ditemukan beberapa fakta respon publik di Indonesia sebagai berikut:

A.1. Kelompok Penekan

Secara umum kelompok-kelompok penekan di Indonesia yang merespon serangan Amerika Serikat ke Afghanistan terbagi dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Kelompok penekan dari organisasi mahasiswa berbasis kampus, diantaranya tercatat Salam UI (semacam Unit Kegiatan Kerohanian Islam di UI) dan BEM Universitas Muhammadiyah Sumut, BEM ITS, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Himpunan Mahasiswa Muslim Antar Kampus (HAMMAS), Pergerakan

- Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pelajar Islam Indonesia (PII), dan Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI).
2. Kelompok penekan dari organisasi Islam berbasis pemuda, diantaranya Gerakan Pemuda Islam (GPI), Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM), Nasyiatul Aisyiyah (NA), Hizbut Tahrir, Front Hizbullah, Lasykar Jundullah, Gerakan Anti Zionis dan Antek-anteknya (GAZA), Lasykar Santri, Forum Studi Islam (FOSI), Lasykar Jihad, dan Front Pembela Islam (FPI)/
 3. Kelompok penekan dari organisasi *underbow* partai politik, diantaranya, Gerakan Pemuda Keadilan (Garda Keadilan), Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK), dan Barisan Muda Partai Amanat Nasional (BM PAN), dan Komite Nasional Indonesia untuk Solidaritas Afghanistan (KISA yang berafiliasi ke Partai Keadilan)
 4. Kelompok penekan dari ormas Islam, diantaranya Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS) dan organisasi yang anggotanya para ulama dari ormas-ormas Islam yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).
 5. Kelompok penekan dari ormas non Islam diantaranya Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), kemudian Gereja Bethel Indonesia (GBI), Badan Musyawarah Antar Gereja, Gereja Katolik Indonesia (GKI) dan Parasida Hindu Dharma bersama-sama dengan PW NU Jatim, PW Muhammadiyah Jatim, dan GP Anshar membentuk Forum Lintas Agama (FLA) untuk membantu rakyat Afghanistan.

Secara umum kelompok-kelompok penekan tersebut diatas menyikapi serangan Amerika Serikat ke Afghanistan melalui berbagai bentuk aksi, diantaranya adalah:

1. Aksi demonstrasi. Sejak serangan dilakukan AS hampir semua kelompok berbasis Islam di Indonesia menggunakan bentuk aksi demonstrasi dalam menyikapi serangan tersebut. Aksi demonstrasi terjadi terutama di kota-kota utama di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Bandung, Makasar dan kota-kota lainnya. Kelompok-kelompok penekan yang melakukan aksi demonstrasi diantaranya dilakukan oleh GPI, FPI, KAMMI, HMI, HAMMAS, Hizbut-Tahrir, IMM, IRM, NA, Pemuda Muhammadiyah, Front Hizbullah, FOSI, KBM-UMJ, Lasykar Jundullah, Lasykar Santri, beberapa Senat Mahasiswa, Salam UI, GAZA, PII, KISDI dan lain-lain. Dari berbagai aksi tersebut yang kemudian berbuntut bentrok antara massa dengan aparat keamanan terjadi ketika demo yang dilakukan massa FPI di Jakarta pada 14 Oktober 2001 (JP, 15/10/2001) Tuntutan para demonstran dalam aksi yang mereka lakukan adalah mengutuk serangan Amerika Serikat atas Afghanistan serta tuntutan agar pemerintah RI lebih tegas kepada AS sampai pada tingkatan pembekuan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat.
2. Pengiriman sukarelawan ke Afghanistan. Setidaknya kelompok yang berencana mengirim sukarelawan ke Afghanistan adalah Gerakan Pemuda Islam (GPI), Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), Forum Ulama

Madura., Yayasan Persaudaraan Muslim Indonesia, dan Front Pembela Islam (FPI). Dari berbagai kelompok di atas, yang terpublikasi dan secara transparan telah mengirimkan sukarelawanannya ke Afghanistan adalah MER-C bekerjasama dengan Komite Nasional Indonesia untuk Solidaritas Afghanistan (KISA) melalui aksi kesehatan di barak-barak pengungsi. Adapun kelompok-kelompok yang lain, beberapa investigasi wartawan mengindikasikan adanya sukarelawan dari Indonesia, akan tetapi dari kelompok mana mereka berasal tidak begitu jelas.

3. Ancaman *sweeping* terhadap warga Amerika Serikat. Ancaman *sweeping* terutama dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam di Solo. Ketika Amerika Serikat menyerang Afghanistan KAMMI, HMI, HAMMAS, Lasykar Santri dan PII Solo berunjuk rasa di Mapolwil Surakarta meminta aparat keamanan di Surakarta untuk mengevakuasi warga asing, terutama Amerika Serikat. Hal yang sama juga menjadi tuntutan FPI Jember yang meminta warga AS untuk meninggalkan Indonesia. Terkait dengan isu *sweeping* ini terjadi penentangan oleh sebagian publik di Indonesia, misalnya ratusan warga Karang Asem Bali yang tergabung dalam Dewan Perwakilan Massa (DWM) melakukan demo anti *sweeping*.
4. Ancaman boikot terhadap produk-produk Amerika Serikat. Ancaman ini diwujudkan dalam beberapa bentuk aksi, mulai dari seruan boikot produk AS sampai dengan aksi “penyegelan” perusahaan makanan cepat saji seperti terjadi di Yogyakarta dan Makassar, dan pembakaran secara simbolik barang-barang produk Amerika Serikat seperti pada demo di Surabaya.

5. Penggalangan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Afghanistan. Aksi penggalangan dana untuk rakyat Afghanistan setidaknya dilakukan oleh Partai Keadilan melalui KISA, PPP, MER-C, YDSF, Dompot Dhuafa Republika, DSUQ Ummul Qura, LMI-UI, PKPU dan Darut Tauhid Bandung. Selain itu juga dari Forum Lintas Agama (FLA) yang terdiri dari PW NU Jatim, PW Muhammadiyah Jatim, GP Anshar, GBI, Badan Musyawarah Antar Gereja, Parasida Hindu Dharma, dan GKI. Bahkan pemerintah pun juga ikut membantu musibah yang dialami rakyat Afghanistan.

A.2. Partai Politik

Selain kelompok-kelompok penekan yang menggunakan gerakan-gerakan ekstra parlementer dalam mendesakkan kepentingannya terhadap pemerintah, partai politik sebagai lembaga yang mengartikulasikan dan mengagreasikan kepentingan publik juga ikut menyuarakan sikapnya terhadap serangan Amerika Serikat ke Afghanistan. Suara partai politik dalam hal ini diwakili oleh para tokohnya di DPR.

Partai-partai politik dalam merespon serangan Amerika Serikat ke Afghanistan beragam. PDIP melalui Sekjen Sutjipto secara resmi menyatakan prihatin atas serangan AS dan sekutunya ke Afghanistan dan meminta pemerintah AS-bila terpaksa melakukan operasi militer-untuk skala dan waktu yang terbatas. PDIP juga meminta PBB mengambil langkah bersama untuk membantu penderitaan rakyat Afghanistan, dan PDIP tidak akan pernah mendukung keterlibatan Indonesia dalam aksi militer membantu AS (*Kompas*, 10/10/2002).

DPP PKB melalui Wakil Sekjen Yahya C Staqif menyesalkan serangan AS atas Afghanistan dan menuntut AS menghentikan serangan tersebut. Sama halnya dengan PDIP, DPP PKB juga menuntut pemerintah untuk tidak melibatkan diri dalam bentuk dan cara apapun dengan serangan AS tersebut. PKB juga mengajak seluruh bangsa Indonesia khususnya umat Islam agar menahan diri, setidaknya dalam waktu satu minggu dengan tidak melakukan tindakan yang menjurus anarkhis (*Republika*, 9/10/2002).

Sementara itu, pernyataan kutukan terhadap serangan AS disuarakan oleh DPP PPP dan PBB. Hamdan Zoelva dan Ir. Azrul Azwar dari DPP PBB menyerukan kepada PBB untuk menyeret George W Bush ke Mahkamah Internasional dengan status penjahat perang (*Republika*, 9/10/2002). Ir Akbar Tanjung dari Partai Golkar menanggapi serangan AS dengan meminta pemerintah Presiden Megawati untuk segera menyatakan sikap yang jelas. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Wakil Ketua DPP PAN AM Fatwa yang meminta pemerintah RI lebih tegas dalam politik luar negerinya dengan berusaha menghentikan agresi tersebut (*Jawa Pos*, 11/10/2001).

Kemudian, Partai Keadilan dalam konferensi pers menyatakan selain mengutuk serangan Amerika Serikat terhadap Afghanistan juga mendesak pemerintah untuk bersikap tegas dan berani meninjau ulang hubungan diplomatiknya dengan AS, dan seruan boikot terhadap produk-produk AS (*Jawa Pos*, 14/10/2001). Bahkan sekitar satu pekan setelah itu Partai Keadilan sebagai satu-satunya partai yang secara resmi menurunkan puluhan ribu massanya memprotes serangan AS atas Afghanistan, kembali mendesak pemerintah meninjau ulang hubungan diplomatiknya dengan AS

(*Jawa Pos*, 20/10/2001). Tuntutan pembekuan hubungan diplomatik dan boikot produk AS juga disuarakan oleh Partai Bulan Bintang.

Dalam rapat konsultasi antara DPR dengan pemerintah (presiden), DPR secara resmi meminta kepada pemerintah lebih tegas dan jelas dalam menyikapi aksi militer Amerika Serikat ke Afghanistan (*Kompas*, 13/10/2001).

A.3. Tokoh dan Pengamat

Respon terhadap serangan AS atas Afghanistan dikalangan tokoh dan pengamat pada umumnya tidak menghendaki terjadinya serangan tersebut. Riza Sihbudi, salah seorang peneliti senior di LIPI, menilai serangan AS dan Inggris ke Afghanistan sudah masuk dalam kategori invasi dan melanggar hukum internasional. Tidak ada dasar kuat bagi AS untuk menyerang sebuah negara berdaulat, terlebih tanpa dilandasi alasan yang rasional. Kasus Afghanistan dengan Taliban berbeda dengan kasus Irak karena Irak menginvasi Kuwait. Dalam kasus Afghanistan tidak ada unsur seperti itu, sehingga jelas AS melakukan pelanggaran hukum internasional (*Republika*, 9/10/2001).

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Sumaryo Suryokusumo yang mengatakan bahwa AS tidak mengindahkan hukum-hukum internasional dalam melakukan penyerangan terhadap Afghanistan. Menurutnya AS seharusnya memperhatikan beberapa asas dalam rangka penyerangan terhadap Afghanistan. Yaitu asas proporsional yang menekankan adanya ketidakberimbangan antara kekuatan AS dan kekuatan Afghanistan. Asas kedua adalah masih tidaknya berlangsung konflik antara negara penyerang dan yang

diserang. Asas yang ketiga adalah pembuktian secara hukum (*Republika*, 20/10/2001).

Melihat tidak adanya dasar hukum yang jelas atas serangan tersebut, Indria Samego, salah seorang peneliti di LIPI, mengatakan bahwa presiden harus tanggap terhadap aspirasi sebagian besar rakyat Indonesia dan mendesak presiden segera menyatakan kecaman keras terhadap keputusan AS menyerbu Afghanistan (*Kompas*, 9/10/2001). Hal yang sama juga dikemukakan oleh KH Abdurrahman Wahid yang mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas dengan mengutuk serangan AS dan sekutunya di Afghanistan (*Kompas*, 11/10/2001). Kecaman juga disampaikan oleh Ketua PB NU Hasyim Muzadi yang menentang serangan AS untuk menghukum Usamah bin Laden (*Jawa Pos*, 9/10/2001).

Sementara itu, PP Muhammadiyah Ahmad Syafi'ie Ma'arif dalam statemen resminya juga mengutuk keras serangan AS atas Afghanistan dan menyerukan segenap dunia Islam untuk menggalang solidaritas dan perjuangan diplomasi melalui jalur OKI dan PBB untuk mencegah serangan berikutnya. Muhammadiyah juga mengajak segenap kekuatan Islam untuk mengindari diri dari tindakan yang mengarah kepada pembalasan yang bertentangan dengan prinsip dan ajaran Islam (*Jawa Pos*, 9/10/2001). Upaya melibatkan PBB dan OKI dalam penyelesaian konflik ini juga di suarakan oleh Shalahuddin Wahid seorang pengamat politik dan tokoh NU (*Republika* 9/10/2001) dan mantan Menlu Alwi Syihab (*Kompas*, 12/10/2001).

Menanggapi dinamika internal terkait dengan respon publik seperti tuntutan pembekuan hubungan diplomatik dengan AS, ancaman *sweeping* terhadap warga AS, boikot poduk AS, dan pengiriman sukarelawan ke Afghanistan, ada beberapa

pandangan para politisi dan pengamat. Amien Rais sebagai ketua DPP PAN dan ketua MPR menilai aksi *sweeping* harus dilarang karena bertentangan dengan nilai moral, hukum dan agama (*Republika*, 1/10/2001). Andi Malarangeng juga berpendapat sama bahwa aksi *sweeping* atas warga AS di Indonesia dinilai berlebihan karena warga negara tidak dapat diidentikkan dengan kebijakan negaranya (*Kompas*, 2/10/2001).

Menanggapi tuntutan untuk membekukan hubungan diplomatik dengan AS, Amien Rais menyayangkan sikap MUI yang meminta pemerintah membekukan hubungan diplomatiknya dengan AS, sementara berkait dengan maraknya seruan boikot produk AS, Amien menyatakan pendapat tersebut perlu dihargai, namun Indonesia tidak bisa seperti Malaysia yang bersikap lantang karena Indonesia masih berkepentingan dengan IMF (*Jawa Pos*, 10/10/2001). Statemen ini diulang lagi ketika memberikan pidato politik di HUT DPW PAN Lampung. Amien Rais mengatakan bahwa meski Indonesia termasuk negara besar keempat di dunia, namun secara obyektif masih sulit melepaskan ketergantungan dengan AS. Bukti ketergantungan itu bisa terlihat misalnya pada peranan IMF, CGI, dan Paris Club. Pemerintah belum bisa bersikap atas tuntutan sebagian kelompok masyarakat agar meninggalkan AS, juga karena adanya ketergantungan tadi (*Kompas*, 12/10/2002).

Ini sejalan dengan pendapat Umar Juoro, seorang ekonom dari the Habibie Center yang mengatakan bahwa di balik sikap keras pemerintah untuk meneruskan hubungan diplomatiknya dengan AS adalah masalah *recovery* ekonomi. Dengan gerakan anti AS, maka dalam jangka panjang resiko investasi akan semakin suram, dan juga kalau benar-benar terjadi *sweeping*, maka AS mungkin melakukan balasan

lewat Bank Dunia dan IMF (*Jawa Pos*, 11/10/2001) Ketua Komisi I Ibrahim Ambong dari Fraksi Partai Golkar juga menyampaikan statemen bahwa DPR tidak dapat begitu saja untuk memutuskan hubungan dengan AS karena masih banyak pertimbangan lain (*Kompas*, 10/10/2001).

Terkait dengan rencana pengiriman sukarelawan ke Afghanistan, Amien Rais mengatakan bahwa kewenangan sikap ada di tangan pemerintah. Sebaiknya pemerintah menunggu perkembangan selanjutnya (*Kompas*, 10/10/2001). Syamsiwal Qomar salah seorang anggota MPR menyatakan bahwa pemerintah dinilai berlebihan apabila melarang warganya berjihad ke Afghanistan (*Republika*, 10/10/2001).

A.4. Media Massa

Respon media dalam menanggapi serangan AS ke Afghanistan umumnya tidak menghendaki terjadinya serangan tersebut. Koran Kompas dalam Tajuk Rencana satu hari setelah serangan menuliskan "Serangan yang Tidak Kita Kehendaki Itu Akhirnya Terjadi Juga" (*Kompas*, 8/10/2001). Menanggapi sikap pemerintah, media ini memandang tepat sikap pemerintah yang mengikuti dengan keprihatinan yang mendalam terhadap serangan tersebut dan meminta agar serangan dilakukan terhadap sasaran yang terbatas. Selanjutnya, PBB harus mengambil alih inisiatif dalam memerangi terorisme. Untuk membantu rakyat Afghanistan, hal yang bisa dilakukan adalah menyambut ajakan pemerintah untuk memberi bantuan kemanusiaan terhadap rakyat Afghanistan.

Koran Jawa Pos dalam tajuk Jati Diri berjudul "Pro Kontra Penyerangan Afghanistan" (*Jawa Pos*, 17/9/2001) melukiskan bahwa menuding satu pihak tanpa



bukti materiil yang mendukung, apalagi tudingan itu diiringi dengan serangan terhadap pihak yang tertuduh, bukanlah tindakan yang bijak.

B. Respon Pemerintah

Terkait dengan sikap pemerintah dalam merespon serangan AS ke Afghanistan, paling tidak tiga kali pemerintah menyampaikan sikapnya, yaitu tiga hari sebelum serangan AS ke Afghanistan, satu hari setelah serangan AS ke Afghanistan dan, pada waktu acara peringatan Isra' Mi'raj di Masjid Istiqlal

Sidang Kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Megawati dan diadakan pada 4 Oktober 2001, tiga hari sebelum serangan AS terhadap Afghanistan, memutuskan:

1. Pemerintah melarang aksi *sweeping*, pelakunya akan dikenakan sanksi hukum yang tegas.
2. Tidak membenarkan atau tidak menolerir terhadap pelibat secara fisik warga negara Indonesia dalam konflik atau peperangan di negara asing.
3. Indonesia mendorong dan mendesak PBB untuk mengambil prakarsa bagi dilakukannya tindakan kolektif melawan terorisme, termasuk langkah internasional yang tetap, terukur, dan efektif.
4. Aksi untuk memerangi terorisme pasca peristiwa 11 Setember 2001 di New York dan Washington DC tersebut dilakukan secara proporsional, tepat sasaran tidak melebihi batas kepatutan dan tidak menimbulkan tragedi kemanusiaan yang baru.

5. Indonesia menyerukan semua pihak termasuk PBB untuk mengambil langkah-langkah yang konstruktif untuk menghindari dilakukannya perang terbuka, mengingat implikasinya yang luas terhadap keamanan dan perdamaian dunia, serta untuk mencegah terjadinya korban rakyat yang tidak berdosa.
6. Pemerintah tidak melarang unjuk rasa yang dilakukan secara damai tertib dan aman.
7. Pemerintah mencegah unjuk rasa yang melebihi batas kepatutan, seperti mengeluarkan berbagai bentuk ancaman, pembakaran bendera nasional negara mana pun, pembakaran patung kepala negara asing ataupun lambang-lambang kedaulatan negara-negara sahabat.
8. Menindak dan memberi sanksi hukum bagi pengunjuk rasa yang melanggar hukum, termasuk yang melakukan perusakan, serangan fisik terhadap personel, dan aksi-aksi kekerasan lainnya.

Setelah serangan AS ke Afghanistan, pemerintah kembali menyampaikan pernyataan resmi yang disampaikan oleh Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia mengikuti dengan keprihatinan yang mendalam bahwa pada akhirnya tindakan militer telah terjadi di Afghanistan menyusul serangan terorisme pada tanggal 11 September 2001 di New York dan Washington.
2. Pemerintah Indonesia mencatat pernyataan Presiden Amerika Serikat yang menyatakan bahwa operasi ditujukan terhadap sasaran terbatas, yaitu pusat pelatihan teroris dan instalasi militer di Afghanistan serta sejauh mungkin

menghindari jatuhnya korban di kalangan sipil dan bahwa operasi militer tidak dimaksudkan sebagai permusuhan terhadap rakyat Afghanistan dan umat Islam, serta akan dibarengi dengan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Afghanistan berupa penyampaian bahan pangan dan obat-obatan.

3. Pemerintah Indonesia mendesak agar operasi yang telah terjadi tersebut benar-benar tetap bersifat sangat terbatas baik dalam penggunaan kekuatan, sasaran, maupun waktunya dan dengan demikian mengurangi atau meminimalkan korban yang tidak berdosa.
4. Pemerintah Indonesia meminta kembali kepada PBB khususnya Dewan Keamanan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional untuk mengambil langkah-langkah bersama (collective reponse) dalam memulihkan situasi dan upaya menangani aspek kemanusiaan yang ditimbulkan dari konflik tersebut di Afghanistan.
5. Pemerintah Indonesia menyerukan agar reaksi dan rasa simpati masyarakat atas penderitaan rakyat Afghanistan tidak diwujudkan dengan cara-cara yang melanggar hukum dan dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum.
6. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memberikan bantuan kemanusiaan dalam bentuk bahan makanan dan obat-obatan dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya tersebut sebagai wujud simpati untuk

meringankan beban penderitaan rakyat Afghanistan yang telah berlangsung selama 25 tahun terakhir.

Pada saat tekanan publik semakin meningkat dan seiring dengan semakin gencarnya serangan AS kepada rezim Taliban, Presiden Megawati pada saat peringatan Isra' Mi'raj di Masjid Istiqlal mengemukakan sikap tegasnya sekalipun tidak secara spesifik menyebut AS dan Afghanistan dengan mengatakan, "Teroris dan pelaku kekerasan memang harus dihukum. Tapi, mencari atau menghukum pelaku dan negara yang dianggap melindungi harus mengikuti aturan yang diterima umum. Tak boleh, sekelompok orang atau bangsa dengan dalih mencari pelaku terror, lalu menyerang negara lain," tandas Mega. Di bagian lain Mega juga mengatakan bahwa upaya memerangi terorisme yang saat ini dilakukan akan bisa tergelincir pada bentuk terorisme baru. Pada akhirnya itu bisa menimbulkan ketidakadilan dan korban kemanusiaan yang sama sekali tidak dikehendaki.

Selain itu, terkait dengan berbagai aksi solidaritas terhadap Afghanistan, Presiden Megawati menilai aksi tersebut sudah kebablasan. Menurut dia, aksi solidaritas tidak bisa diberikan dengan cara yang salah. Sebab, aksi solidaritas yang salah juga bisa menjurus pada perilaku yang tidak adil (*Jawa Pos*, 15/10/2001).

C. Keterkaitan Respon Publik dengan Kebijakan Domestik dan Luar Negeri

Sebuah peristiwa internasional akan menjadi perhatian publik suatu negara sangat tergantung pada sifat kejadian, lama kejadian, rangsangan pemerintah, dan propaganda asing (Mas'ood, 1989: 72). Serangan Amerika Serikat ke Afghanistan

ditinjau dari sifat kejadian menjadi perhatian publik internasional termasuk publik di Indonesia, karena:

Pertama, serangan AS ke Afghanistan merupakan rangkaian kejadian yang mengiringi peristiwa black September 2001 ketika dua pesawat menabrak dua gedung kembar WTC, satu pesawat menabrak Pentagon dan satu pesawat lainnya jatuh di Pennsylvania. Peristiwa ini menyedot perhatian publik dunia termasuk di dalamnya publik Indonesia. Amerika Serikat menuduh pelakunya adalah Usamah bin Ladin dan ia bersembunyi di Afghanistan yang ketika itu berada di bawah rezim Taliban. Perburuan pemerintah AS yang diikuti dengan serangannya ke Afghanistan, dengan demikian tidak dapat dipisahkan dengan peristiwa besar yang mendahului yaitu black September 2001.

Kedua, serangan AS ke Afghanistan, sebuah negara dengan mayoritas penduduknya muslim, membangkitkan semangat emosional sebagian rakyat Indonesia yang mayoritas muslim. Jalinan emosional antara rakyat Afghanistan dengan rakyat Indonesia menjadikan peristiwa serangan AS ke negara Afghanistan menjadi perhatian publik Indonesia.

Ketiga, peristiwa perang adalah peristiwa yang biasanya diliput besar-besaran oleh media baik cetak maupun elektronik, lokal dan internasional. Media lokal umumnya memberikan porsi sedikit terhadap masalah-masalah internasional, akan tetapi kalau sudah menyangkut perang dan damai porsi internasional akan diberikan perhatian lebih. Sejak peristiwa black September sampai dengan serangan AS ke Afghanistan porsi pemberitaan baik media cetak maupun elektronik di Indonesia

sangat besar sehingga wajar bila publik memiliki perhatian lebih terhadap peristiwa tersebut.

Selain sifat kejadian hal yang dapat menjadikan peristiwa internasional menjadi perhatian publik suatu negara adalah lamanya kejadian. Selama hampir dua bulan publik disugahi dengan pemberitaan seputar peristiwa black September, persiapan serangan AS ke Afghanistan, dan serangan AS ke Afghanistan. Pemberitaan yang terus menerus tentu akan mempengaruhi pandangan publik terhadap peristiwa internasional.

Selanjutnya respon pemerintah juga akan berpengaruh pada perhatian publik terhadap peristiwa internasional. Kunjungan resmi Presiden Megawati Soekarnoputri ke Amerika Serikat seminggu setelah peristiwa black September, statemen resmi pemerintah sebelum dan sesudah serangan AS ke Afghanistan, statemen Presiden pada peringatan Isra' Mi'raj, statemen-statemen para pejabat mengomentari situasi di dalam negeri seperti ancaman *sweeping*, demonstrasi, rencana pengiriman sukarelawan ke Afghanistan, tuntutan boikot produk dan pembekuan hubungan diplomatik dengan AS, dan lain-lain semakin memperluas perhatian publik terhadap peristiwa serangan AS ke Afghanistan. Sebuah peristiwa yang awalnya bersifat internasional, akhirnya menjadi isu nasional bahkan lokal.

Terakhir, propaganda asing juga menjadi faktor pendorong meningkatnya perhatian publik terhadap peristiwa internasional. Propaganda *counter terrorism* yang terus menerus dilakukan AS sejak peristiwa black September agar negara-negara di dunia mendukung langkah AS memerangi terorisme, termasuk didalamnya penyerangan terhadap Afghanistan, menjadikan isu internasional ini menjadi

perhatian publik dunia. Terlebih ketika AS memperluas kebijakan *counter terrorism* ini ke negara-negara lain termasuk Indonesia, misalnya dengan menuduh adanya jaringan Al Qaeda di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa serangan AS ke Afghanistan bukanlah peristiwa yang menjadi konsumsi sebagian kecil publik Indonesia. Ia bukan peristiwa yang bersifat elitis akan tetapi sudah bersifat populis. Selanjutnya, bagaimana hubungan atau keterkaitan antara respon publik dengan respon pemerintah terutama dalam perumusan kebijakan baik domestik maupun luar negeri.

Data-data yang ada menunjukkan adanya korelasi antara respon publik dan respon pemerintah dalam kebijakan domestik dan luar negeri. Ini bisa dilihat dari apa yang menjadi tuntutan publik dan sejauhmana pemerintah memenuhi tuntutan publik tersebut. Korelasi antara tuntutan publik dan respon pemerintah dapat dilihat dari pergeseran sikap pemerintah.

C.1. Pergeseran Sikap Pemerintah

Sejak peristiwa 11 September, kebijakan pemerintah dalam merespon peristiwa demi peristiwa yang mengiringinya sampai dengan serangan AS ke Afghanistan terkesan sangat hati-hati. Misalnya terjadi perdebatan apakah presiden perlu melakukan kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat atau tidak pasca peristiwa 11 September. Sebagian pendapat mengatakan Presiden tidak perlu berkunjung ke AS mengingat suasana AS masih berduka. Dalam salah satu tajuknya, Kompas menilai tidak tepat kunjungan Presiden ke Amerika Serikat (*Kompas*,

17/10/2001). Dalam hal ini pemerintah mengambil keputusan tetap berkunjung ke AS dan mendapat respon positif dari Washington. Pada saat melakukan kunjungan, Presiden Megawati mengemukakan komitmennya mengutuk terorisme. Bahkan Amerika Serikat, sebagaimana dikemukakan menlu Hasan Wirajuda, memandang serius untuk menggalang kerjasama dalam memerangi teroris dengan mengirimkan tim untuk mendiskusikan bagaimana kedua negara bekerjasama (*Jawa Pos*, 2/10/2001).

Ketika Amerika Serikat berencana melakukan serangan ke Afghanistan dengan dalih untuk memburu para teroris, pemerintah Indonesia menghadapi situasi dilematis. Disatu sisi Amerika Serikat dan sekutunya berusaha mendapatkan dukungan termasuk dari Indonesia atas apa yang akan mereka lakukan terhadap Afghanistan, dan pemerintah Indonesia sudah memberikan komitmennya mendukung perang melawan teroris, akan tetapi disisi yang lain publik Indonesia menghendaki pemerintah bertindak tegas menolak invasi AS atas Afghanistan. Dalam situasi semacam ini, sikap yang diambil pemerintah adalah menunggu perkembangan situasi baik domestik maupun internasional.

Situasi dilematis ini terjadi karena ketergantungan Indonesia kepada AS. Sebagai gambaran ketika Presiden Megawati berkunjung ke AS dijanjikan paket bantuan senilai US\$ 400 juta untuk mendorong investasi dan perdagangan, peningkatan plafon GSP sebesar US\$ 100 juta, hibah atau *grand* bantuan teknis untuk APBN 2002 sebesar US\$ 130 juta, hibah US\$ 15 juta untuk Aceh dan Ambon dan US\$ 2 juta untuk pengungsi Timtim, US\$ 40.000 untuk pelatihan militer, dan US\$ 400 juta untuk memperbaharui peralatan TNI (*Gatra*, 6/10/2001)

Terhadap paket bantuan ini, Ketua Komisi I DPR RI Ibrahim Ambong mengingatkan pemerintah, jangan sampai Indonesia dicap mendukung serangan AS atas Afghanistan gara-gara menerima bantuan tersebut. Sementara Akbar Tanjung mengingatkan Presiden Megawati untuk tidak banyak membuat komitmen dengan pemerintah AS (*Gatra*, 6/10/2001). Dukungan terhadap kampanye anti teror Amerika Serikat dikhawatirkan berlanjut menjadi dukungan atas serangan AS ke Afghanistan.

Ketika aksi-demonstrasi semakin marak diberbagai kota di Indonesia, adanya rencana pengiriman sukarelawan ke Afganistan, ancaman *sweeping*, tuntutan agar pemerintah lebih berperan dalam menyelesaikan konflik AS-Afghanistan, dan pada saat yang bersamaan rencana AS menyerang Afghanistan semakin matang, pemerintah baru menentukan sikap. Sikap pemerintah ini dapat dilihat dari hasil sidang kabinet pada tanggal 4 Oktober 2001.

Setelah serangan AS ke Afghanistan, pemerintah kembali menyampaikan pernyataan resmi yang disampaikan oleh Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono. Pernyataan itu lebih tegas dari pernyataan sebelumnya tetapi masih dinilai lunak karena tidak ada kecaman terhadap aksi yang dilakukan AS terhadap Afghanistan. Terlebih bila dikaitkan dengan tuntutan para demonstran agar Indonesia memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Amerika Serikat. Sikap pemerintah ini justru ditanggapi publik dengan demo-demo yang lebih besar.

Menanggapi semakin maraknya aksi solidaritas terhadap Afghanistan, Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan bahwa masalah serangan ke Afghanistan jangan sampai mendomnasi kepentingan nasional Indonesia. Konflik yang terjadi di Afghanistan tidak bersifat permanen, namun kepentingan nasional

lebih bersifat permanen, yaitu bagaimana mengembangkan kehidupan politik demokratis, memulihkan keamanan, ketertiban masyarakat, dan memulihkan ekonomi. Hal senada juga dikemukakan oleh Menhan Matori Abdul Jalil dan Ketua DPA Ahmad Tirtosudiro (*Kompas*, 11/10/2001).

Maraknya kembali aksi-aksi demo menentang AS, ditambah dengan adanya sinyalemen bahwa demo-demo anti AS akan dibelokkan arahnya menjadi demo untuk menggoyang Mega, mengharuskan pemerintah tanggap terhadap tuntutan publik. Akhirnya, pada peringatan Isra Mi'raj, Presiden Megawati menyampaikan statemen kerasnya bahwa tidak dapat dibenarkan suatu negara dengan alasan mencari teroris menyerang negara lain.

Menanggapi statemen Megawati, MUI menghargai sikap tegas Presiden dalam menanggapi agresi ke Afghanistan. Sedangkan DPR melalui ketuanya Ir. Akbar Tanjung meminta pernyataan Presiden Megawati pada acara Isra Mi'raj itu dijadikan sebagai sikap resmi pemerintah menanggapi serangan AS terhadap Afghanistan (*Republika*, 18/10/2001)

C.2. Pergeseran Sikap Wakil Presiden

Pergeseran sikap juga ditunjukkan oleh Wakil Presiden Hamzah Haz, hanya saja pergeseran ini lebih mengacu pada respon atas dinamika domestik. Ketika aksi demonstrasi marak diberbagai kota, wapres Hamzah Haz mempersilahkan aksi-aksi demonstrasi menentang AS dan sekutunya, namun syaratnya tetap dilakukan dalam koridor hukum (*Kompas*, 12/10/2001). Sikap moderat juga ditunjukkan ketika ada keinginan dari berbagai kalangan Islam untuk mengirimkan sukarelawan ke

Afghanistan. Hamzah Haz mengatakan, “Kita juga tidak melarang warga Indonesia bepergian ke Afghanistan dan negara sekitarnya, pemerintah hanya menyarankan agar warga Indonesia tidak melibatkan diri dalam konflik internasional (*Jawa Pos*, 7/10/2001).

Sikap Hamzah Haz ini berubah ketika dia meminta menyudahi demonstrasi anti AS, jangan lagi membicarakan boikot produk AS, sebab belum menyatakan boikot saja sudah banyak orang kulit putih yang keluar (*Kompas*, 20/10/2001). Pada waktu memberika sambutan pada acara peresmian Masjid Baiturrahman, Cawang, Jakarta, Hamzah Haz mengatakan, “ Saat ini kita menghadapi dilema luar biasa. Salah melangkah kita bisa masuk jurang. Karena itulah kepada warga kita muslim, berhentilah berdemonstrasi.” Kemudian beliau juga menambahkan, “Kemarin-kemarin saya masih mempersilakan (untuk berdemonstrasi). Yang penting demo tidak melanggar aturan-aturan hukum. Tapi, sekarang tidak.”

Perubahan sikap Hamzah Haz, sebagai pemimpin partai yang berbasis Islam, yang berlawanan dengan arus umat Islam pada umumnya tergolong aneh. Sehingga beberapa kalangan menilai perubahan sikap Hamzah Haz ini sebagai upaya untuk menyelamatkan posisinya. Apabila Hamzah Haz masih tetap menjadi “sumbu pemanas” aksi-aksi anti AS, maka sinyalemen bahwa aksi-aksi demo dibelokkan untuk menggoyang Megawati akan dapat diarahkan kepada dirinya. Sebagian pengamat yang lain berpendapat bahwa perubahan sikap Hamzah Haz ini sebagai upaya untuk menarik simpati AS dan sekutunya. Dukungan internasional sangat diperlukan oleh Hamzah untuk kepentingan Pemilu 2004.



Statemen Hamzah Haz ini direspon oleh sebagian kalangan justru dengan aksi demonstrasi yang lebih besar. Misalnya demo puluhan ribu massa Partai Keadilan langsung dipimpin oleh Presiden Partai Dr. Hidayat Nur Wahid. Dalam kesempatan ini, Hidayat Nur Wahid mengatakan, "Saya justru berharap Hamzah Haz selaku Wapres dan ketua PPP berada didepan aksi untuk membela umat Islam dan kepentingan bangsa Indonesia (*Jawa Pos*, 20/10/2001). Kemudian Umar al Hamd seorang ulama PPP menegaskan para ulama PPP bertekad melanjutkan unjuk rasa menentang AS. Bahkan Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Jatim mengancam DPP PPP agar menjadi jati diri Partai Islam dan meminta agar bersikap tegas membela umat Islam di Afghanistan (*Jawa Pos*, 22/10/2001).

C.3 Pergeseran Sikap TNI/ Polri

Pergeseran juga dapat ditemukan pada sikap TNI-Polri, terutama dalam penanganan aksi-aksi unjuk rasa. Pergeseran sikap TNI-Polri sejalan dengan sikap pemerintah dalam merespon dinamika domestik. Pada saat demonstrasi menentang AS belum menjadi gelombang besar demonstrasi yang berlangsung terus-menerus dan sporadic, aparat keamanan masih bersifat persuasif dan menjauhkan diri dari tindakan represif. Bahkan keinginan sebagian kalangan untuk pergi berjihad ke Afghanistan tidak dilarang. Pangdam Brawijaya Mayjen Sudi Silalahi menyatakan tidak bisa melarang pendaftaran sukarelawan ke Afghanistan. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Kapolda Jatim Irjen Polisi Sutanto dan Gubernur Jawa Timur Imam Utomo. Menurut Gubernur sesama Islam boleh saja membantu umat Islam yang lain. Pemerintah Propinsi tidak ikut campur seperti menyediakan fasilitas dan

dana. Apabila ada yang ingin berangkat dipersilahkan berangkat (*Jawa Pos*, 2/10/2001). Kondisi ini berubah sejak keluarnya statemen resmi pemerintah pada 4 Oktober 2001 yang secara jelas melarang warga negara Indonesia menjadi sukarelawan asing.

Eskalasi demo anti AS diberbagai kota semakin meningkat terutama sejak serangan AS ke Afghanistan tanggal 7 Oktober 2001. Akibatnya pengamanan Kedutaan AS dan beberapa konjen AS yang sebelumnya relatif longgar, semakin diperketat. Sebagai gambaran dahulu para demonstiran anti AS di Surabaya masih dapat mencapai pagar konjen, tetapi sejak serangan AS ke Afghanistan para demonstiran sudah tidak diijinkan mendekati pagar konjen. Hal yang sama juga terjadi di Kedutaan Besar AS di Jakarta. Aparat kepolisian juga meningkatkan kewaspadaan di daerah perusahaan/ investasi AS seperti di PT Caltex, PT Badak Natural Gas Lequefaction (NGL), serta PT Freepory (*Kompas*, 9/10/2001).

Tindakan aparat menangani para demonstiran juga semakin represif. Misalnya Polresta Surabaya Utara membubarkan aksi di DPRD Jatim secara paksa karena tidak punya ijin resmi. Kelompok yang akan mengadakan demo berasal dari FPI, HMI, HAMMAS, GPI, Hizbut Tahrir (*Republika*, 13/10/2001). Kemudian, Polresta Solo melarang anggota lasykar Islam maupun elemen Islam lainnya berangkat ke Jakarta untuk demo menentang AS. Untuk itu Polres menempatkan personilnya di terminal dan stasiun KA (*Jawa Pos*, 16/10/2001). Puncaknya adalah pembubaran demo FPI di Jakarta secara paksa sehingga jatuh korban dipihak demonstiran dan 4 wartwan (*Jawa Pos*, 17/10/2001).

Tindakan aparat yang semakin represif, selain dipicu oleh sikap para demonstran yang semakin hari semakin keras menentang AS dan mengecam pemerintah, juga karena semakin kuatnya desakan luar terutama Amerika Serikat kepada aparat keamanan untuk mengamankan warganegara dan aset-aset milik AS. Ini terlihat dari statemen-statemen Dubes AS untuk Indonesia Robert Gelbard yang menyatakan Polri tidak serius menangani ancaman sweeping dan protes Konjen AS di Surabaya yang setiap hari menjadi sasaran demo. Tindakan aparat yang semakin represif terhadap demo-demo anti AS ini yang memunculkan tuduhan bahwa Polri sudah menjadi “kacung” AS.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertama, peristiwa serangan AS ke Afghanistan menjadi fenomena yang menjadi perhatian publik dunia termasuk Indonesia. Sifat kejadian, lama kejadian, rangsangan pemerintah, dan propaganda asing membuat peristiwa ini menjadi konsumsi publik di Indonesia.

Kedua, respon publik di Indonesia, terutama di kalangan Islam, umumnya mengecam serangan AS atas Afghanistan. Kecaman ini muncul karena ada ikatan emosional yaitu sentimen keagamaan antara sebagian besar rakyat Indonesia dengan rakyat Afghanistan. Sementara itu, respon pemerintah dalam hal ini bersifat sangat hati-hati dan cenderung menunggu situasi domestik dan internasional.

Ketiga, pemerintah dihadapkan pada situasi dilematis antara tuntutan publik domestik dengan tuntutan masyarakat internasional (AS dan sekutunya). Situasi dilematis ini disebabkan Indonesia masih memiliki ketergantungan dengan negara-negara Barat, sehingga untuk bersikap tegas menentang serangan AS pemerintah Indonesia masih gamang.

Ketiga, ada pola interaksi antara suasana kehidupan politik pemerintah atau suprastruktur dengan suasana kehidupan politik yang ada di masyarakat atau infrastruktur dalam kasus respon publik dan pemerintah terhadap serangan Amerika Serikat ke Afghanistan. Tuntutan-tuntutan dari infrastruktur ditanggapi oleh

suprastruktur melalui berbagai kebijakan, dan kebijakan itu sendiri akan berdampak dan ditanggapi kembali oleh infrastruktur, demikian seterusnya. Adanya pola interaksi semacam ini menyebabkan terjadinya pergeseran sikap pemerintah karena dipengaruhi tuntutan publik domestik dan internasional.

Saran-saran

Pertama, sebagai konsekuensi negara demokrasi pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyatnya dalam setiap perunusan kebijakan, termasuk di dalamnya kebijakan luar negeri. Untuk dapat menyerap aspirasi rakyat, pemerintah harus membangun hubungan, komunikasi, dan dialog dengan berbagai kalangan. Secara spesifik, karena Indonesia mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, maka interaksi pemerintah dengan kelompok-kelompok Islam dalam suasana dialogis perlu diciptakan.

Kedua, pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan dengan negara lain. Karena fakta menunjukkan ketergantungan yang berlebihan menyebabkan pemerintah tidak dapat sepenuhnya independen dalam mengambil kebijakan.

Ketiga, Indonesia harus memainkan peran yang lebih besar dalam ikut melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi sebagaimana diamanahkan oleh UUD 45 dan sesuai dengan garis kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif dengan cara ikut terlibat dalam penyelesaian persoalan-persoalan internasional, karena eksistensi Indonesia sebagai negara besar diakui oleh masyarakat internasional. Ini

bisa dilihat dari respon positif AS ketika mendapat kunjungan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Keempat, Indonesia harus tetap konsisten menjalankan garis kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif dalam kerangka pencapaian kepentingan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Nurul, *Pendapat Umum dan Peliputan Aspirasi Masyarakat*, Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Depdagri, 1997.
- Bandoro, Bantarto, *Hubungan Luar Negeri Indonesia selama Orde Baru*, Jakarta: CSIS, 1994.
- Daugherty, James E., Robert L. Pfatzgraff, *Contending Theory of International Relations: A Comprehensive Survey*, NY: Longman, 1997.
- Djalal, Hasjim, *Politik Luar Negeri Indonesia dalam Dasawarsa 1990*, Jakarta: CSIS, 1997.
- Djiwandono, J. Soedjadi, *Confrontasi Revisited, Indonesia's Foreign Policy Under Soekarno*, Jakarta: CSIS, 1996.
- Zein, Hasan, *Diplomasi Revolusi*, Bandung: Bulan Bintang, 1984.
- Imawan, Riswanda, *Pendapat Umum dan Peliputan Aspirasi Masyarakat*, Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Depdagri, 1997.
- Leifer, Michael, *Politik Luar Negeri Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1989.
- Mas' oed, Mohtar, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi*, Yogyakarta: PAU-SS-UGM, 1989.
- Sabir, M., *Politik Bebas Aktif*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1987.
- Soeriawidjaja, Ahmed K., *Pendapat Umum dan Peliputan Aspirasi Masyarakat*, Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Depdagri, 1997.
- Weinstein, Franklin B., *Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence*, Ithaca and London: Cornell UP, 1976
- Harian dan Majalah
- Gatra*, 6 Oktober 2001
- Jawa Pos*, bulan September dan Oktober 2001
- Kompas*, bulan September dan Oktober 2001
- Republika*, bulan September dan Oktober 2001

PERSONALIA DAN ORGANISASI:

1. Kepala Proyek
 - 1.1. Nama lengkap : M. Muttaqien, SIP
 - 1.2. Pangkat dan Jabatan/NIP : IIIA/Asisten Ahli/ 132 230 968
 - 1.3. Tempat Penelitian/Alamat : FISIP Univeritas Airlangga Surabaya
Jl. Airlangga 4-6, Surabaya, 60286
Tlp. 5034015 Fax. 5022492
 - 1.4. Tugas/Hubungan kerja : Mengkoordinasi & Melakukan Penelitian
 - 1.5. Waktu yang disediakan untuk Penelitian ini : 24 jam per minggu

2. Tenaga Peneliti I
 - 2.1. Nama lengkap : Siti Rokhmawati Susanto, SIP
 - 2.2 Pangkat dan Jabatan/NIP : IIIA/Asisten Ahli/132 255 147
 - 2.3. Tempat Penelitian/Alamat : FISIP Univeritas Airlangga Surabaya
Jl. Airlangga 4-6, Surabaya, 60286
Tlp. 5034015 Fax. 5022492
 - 2.4. Tugas/Hubungan kerja : Melakukan Penelitian
 - 2.5. Waktu yang disediakan untuk Penelitian ini : 24 jam per minggu

3. Tenaga Peneliti II
 - 3.1. Nama lengkap : Joko Susanto, SIP
 - 3.2 Pangkat dan Jabatan/NIP : IIIA/Asisten Ahli/132 276 195
 - 3.3. Tempat Penelitian/Alamat : FISIP Univeritas Airlangga Surabaya
Jl. Airlangga 4-6, Surabaya, 60286
Tlp. 5034015 Fax. 5022492
 - 3.4. Tugas/Hubungan kerja : Melakukan Penelitian
 - 3.5. Waktu yang disediakan untuk Penelitian ini : 24 jam per minggu

1 AUG 2004

